

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, serta Tujuan dan Sasaran sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 ini difokuskan pada pencapaian Tujuan/Sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam RENJA, RENSTRA dan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2021.

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang kurang berhasil, telah memberikan masukan/umpan balik yang sangat berharga dan dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru pada tahun berikutnya.

Kami berharap LAKIP (Laporan Kinerja) ini dapat memberikan gambaran akuntabilitas Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang bermanfaat bagi Kami khususnya dalam menjaga amanah dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terlebih lagi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Untuk itu saran, kritik yang membangun dan dukungan serta kerjasama yang berkelanjutan dari semua pihak sangat kami harapkan.

Kotabaru, Pebruari 2017
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru,

Drs. H. HARIANSYAH, M. AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19630713 198503 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	I - 1
A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH.....	I - 2
B. ASPEK STRATEGIS.....	I - 5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II - 1
A. PERENCANAAN KINERJA.....	II - 1
B. PENETAPAN KINERJA	II - 9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	III - 1
A. PENGUKURAN KINERJA.....	III - 1
B. CAPAIAN KINERJA	III - 2
C. PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TAHUN LALU.....	III -15
D. REALISASI ANGGARAN	III - 27
BAB IV. PENUTUP	IV - 1
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. STRUKTUR ORGANISASI	

DAFTAR TABEL

1. Tabel I.1 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.....	I - 3
2. Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan.....	II - 3
3. Tabel II.2 Perjanjian Kinerja.....	II - 9
4. Tabel II.3 Penetapan Kinerja.....	II - 12
5. Tabel III.1 Capaian Kinerja	III - 2
6. Tabel III.2 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Lalu.....	III - 15
7. Tabel III.3 Realisasi Anggaran	III - 27

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan informasi sejauh mana Instansi Pemerintah dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan rencana strategis yang dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, diantaranya :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

- Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021;
 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017.

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791), dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan SKPD. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. pembinaan aparatur pemerintah daerah;

- e. pembinaan administrasi pemerintah, hukum dan organisasi;
- f. fasilitasi administrasi perekonomian, pembangunan, pertanahan, kesejahteraan rakyat, dan bina pengelolaan sumber daya;
- g. pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah, rumah tangga, prasarana dan sarana pemerintahan, serta hubungan masyarakat; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, terdiri dari :

No	Nama Perangkat Daerah
(1)	(2)
1.	Sekretaris Daerah :
2.	Asisten Pemerintahan, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan c. Sub Bagian Kerjasama Daerah. 2) Bagian Organisasi, terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian kelembagaan; b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur. 3) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Bagian Perekonomian, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi; b. Sub Bagian Bina Potensi dan Prasarana Sarana; dan c. Sub Bagian Pengembangan Usaha daerah. 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan; b. Sub Bagian Fasilitasi Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata; dan c. Sub Bagian Fasilitasi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 3) Bagian Pertanahan, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Fasilitasi Pengadaan dan Pengendalian Pertanahan; b. Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan; dan c. Sub Bagian Tata Batas Wilayah.
4.	Asisten Administrasi Umum, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Bagian Umum, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Pengadaan; dan
- c. Sub Bagian Pemeliharaan Aset;
- 2) Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Pengolahan Data Elektronik;
 - b. Sub Bagian Protokol dan Kehumasan; dan
 - c. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
- 3) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Akuntansi;
- 4) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

B. ASPEK STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Mengacu pada kerangka pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi : “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisata Serta Kemandirian Menuju Masyarakat yang Berkualitas dan Sejahtera”.

Misi :

1. Mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor produksi dibidang pertanian perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk menunjang ekowisata dan agrobisnis serta percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru.
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan pemenuhan dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.
4. Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong.
5. Mewujudkan masyarakat yang religius sehat, cerdas, terampil.
6. Mewujudkan perbaikan sistim subsidi, perlindungan sosial dan penanggulangan/pengentasan kemiskinan.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Satuan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah mengemban pada misi yang ke-7 yaitu ; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021

a. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, dan juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pandangan di atas Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru merumuskan Visinya, adalah :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Responsif, Profesional, Akuntabel Dalam Rangka Pelayanan Publik”.

Selanjutnya mengenai kandungan visi itu mendapatkan penjelasan sebagai berikut :

Yang dimaksud Penyelenggaraan Pemerintah yang responsif adalah kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Upaya yang dilakukan yaitu menciptakan Pemerintahan yang lebih mampu memenuhi keinginan rakyat sesuai kebutuhan yang diinginkan.

Beberapa langkah yang dilaksanakan guna memenuhi prinsip-prinsip Pemerintahan yang responsif adalah :

1. Melaksanakan secara cepat pelaksanaan birokrasi atau debirokratisasi pemerintahan;
2. Menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang harus dilayani menjadi pertimbangan lebih utama;
3. Melakukan pemberdayaan (*empowerment*) kepada Aparatur sebagai pelaksana pelayanan publik agar mereka bekerja dengan baik dan cepat untuk mendapat hasil kerja yang optimal;

Kemudian yang dimaksud dengan Pemerintahan yang bersifat profesional adalah pelaksanaan Pemerintahan yang memiliki kompetensi yang mendasari kinerja dengan keahlian yang maksimal dalam pelayanan publik. Beberapa langkah yang dilaksanakan guna memenuhi prinsip-prinsip Pemerintahan yang bersifat profesional adalah :

1. Melakukan pemberdayaan (*empowerment*) kepada Aparatur sebagai pelaksana pelayanan publik agar mereka bekerja dengan baik dan cepat untuk mendapat hasil kerja yang optimal;

2. Mengikuti kerjakan pihak yang berkumpeten sebagai mitra kerja dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan.

Kemudian yang dimaksud dengan Pemerintahan yang bersifat akuntabel adalah pelaksanaan Pemerintahan yang bertanggung jawab baik terhadap Tuhan maupun masyarakat. Beberapa langkah yang dilaksanakan guna memenuhi prinsip-prinsip Pemerintahan yang bersifat akuntabel adalah :

1. Melakukan pemberdayaan (*empowerment*) kepada Aparatur Pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik agar mereka bekerja dengan cepat dan tepat untuk mendapat hasil kerja yang optimal;
2. Dalam menjalankan program dan kegiatan yang dilaksanakan agar lebih baik dengan biaya yang lebih efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelenggara Negara yang bersih adalah mentaati azas-azas umum penyelenggara yang bersih dan bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang.

Adapun Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik;

c. Tujuan

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan mempunyai tujuan sebagai implementasi Visi dan Misi yaitu:

1. Mewujudkan efektifitas penyelenggara administrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik pada pimpinan daerah dan perangkat daerah;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
3. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum;
4. Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah ;

5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

d. Sasaran

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru mempunyai sasaran yang dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kantor dan kinerja administrasi pemerintah;
2. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru ;
3. Meningkatnya tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Meningkatnya penyebarluasan hasil-hasil pembangunan daerah
6. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
7. Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
9. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur;
10. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
11. Meningkatnya kualitas sosial, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi. Isu-isu yang dimaksud mencakup :

- Program dan kegiatan yang ada sebagian besar bersifat fasilitasi sehingga dalam pelaksanaannya masih berupa Indikator Output bukan indikator Outcome.
- Belum terpolanya penerapan sistem prestasi dikalangan Pegawai Negeri sipil, sehingga menjadi kendala dalam peningkatan kinerja PNS yang efektif dan efisien.
- Perlunya peningkatan SDM yang profesional dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan secara akuntabel, efektif dan transparan.
- Masih belum terselesaikannya mengenai sengketa tapal batas antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Lain.
- Masih perlunya pendataan aset Pemerintah Daerah yang ada pada daftar inventarisasi barang secara keseluruhan.

- Masih adanya sengketa lahan yang belum terselesaikan antara masyarakat dengan perusahaan.
- Masih adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang perlu disyahkan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tugas.
- Belum maksimalnya data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
- Perlunya sinkronisasi antara sasaran visi dan misi Pemerintah dengan Laporan Akuntabilitas Pemerintah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Masih perlunya peningkatan penggunaan perangkat teknologi informasi dalam mengakses Anjab dan ABK SKPD secara efektif dan efisien.
- Masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat (kurang mandiri dan produktif) sehingga secara sosialogis dan psikologis kurang menguntungkan bagi pembangunan daerah.
- Masih perlunya bantuan atau fasilitasi dari Pemerintah kepada organisasi Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan.
- Perlunya perubahan dan penyesuaian SOTK Perangkat Daerah dengan keadaan kondisi yang diinginkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan secara sistematis mengedepankan isu-isu, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana kerja yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peranan penting Renstra tersebut adalah :

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang akan dilaksanakan.
2. Dokumen yang dapat digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada, sehingga dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Sebagai acuan tahunan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah adalah memuat sasaran strategis yang ingin dicapai dengan indikator dan target yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Hal : 10 RENCANA KINERJA TAHUNAN

B. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya. Di dalam kinerja ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya untuk mencapai Sasaran yang telah ditetapkan melalui target-target capaian kinerja.

Perjanjian kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama dan Indikator lainnya adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan kebijakan anggaran dan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan data dukung. Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 ini yaitu :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor dan kinerja administrasi pemerintah	Tersedianya layanan administrasi terhadap aparatur dan masyarakat	12 bulan
2.	Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru	Terselenggaranya layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik	400 pengadaan
3.	Meningkatnya tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	19 Kali

4.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan	Persentase layanan penyelenggaraan pemerintah daerah dan penataan daerah otonom	100 %
5.	Meningkatnya penyebaran hasil-hasil pembangunan daerah	Terlaksananya pelaksanaan pameran dan Peringatan hari jadi	2 kali
6.	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terciptanya produk hukum raperda/raperbup menjadi perda/perbup	20 perda/perbup
7.	Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Terlaksananya penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)	56 SOPD
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja (LAKIP, LPPD dan LKPJ)	Bulan Februari
9.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya pelaksanaan bimtek	60 kali
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	11 kasus
11	Meningkatnya kualitas sosial, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi peningkatan sosial, budaya dan agama	60 kegiatan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.998.420.236	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.072.635.000	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	639.869.000	
4	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	1.172.524.622	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	687.732.300	
6	Program Kerjasama Pembangunan	152.368.000	
7	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	8.870.230.000	
8	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	5.893.847.782	
9	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	438.400.000	
10	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	479.596.750	
11	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	713.933.000	
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	58.857.000	
13	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	604.119.313	

No	Program	Anggaran	Keterangan
14	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.493.028.900	
15	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	2.357.768.373	
16	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	2.237.064.827	
17	Program Fasilitasi Peningkatan Sosial, Budaya dan Agama	9.131.402.100	
18	Program Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Bidang Ekonomi	294.260.700	
19	Program Peningkatan Usaha Milik Daerah/Desa (BUMD/BUMDesa)	200.680.000	
20	Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonom	3.152.518.560	
21	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	88.200.000	
22	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara	1.597.375.500	
23	Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	480.843.700	
	Jumlah	70.815.176.463	

HAL : 17 S/D 22 PENETAPAN KINERJA

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru
: 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas pelayanan kantor dan kinerja administrasi pemerintah	Tingkat Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	Jumlah surat masuk dan keluar	60.000 lembar surat masuk & keluar
	Jumlah pembayaran jasa listrik, air, telepon yang harus dibayar dalam 1 tahun	600 jumlah kali jasa rekening
	Jumlah penyediaan jasa asrama mahasiswa dan mess pemda	950 orang
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional, BBM, penyeberangan ferry dan pergantian suku cadang	70 unit
	Jumlah pembayaran jasa administrasi Keuangan dan pengelolaan keuangan	2022 orang kali bulan
	Jumlah pembayaran jasa kebersihan gedung kantor	380 kali jasa
	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja lingkup Setda	1321 kali
	Jumlah penyediaan alat tulis	396 jenis
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72 set dari 70.000 lembar penggandaan
	Jumlah penyediaan komponen listrik/BBM dan sparepart genset	108 set
	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	324 set
	Jumlah penyediaan media massa / surat kabar	15 jenis
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	110,160 orang
	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	525 orang kali
	Jumlah pembayaran tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran dan keamanan	2,798 orang kali bulan
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	208 orang kali
	Jumlah penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	12 bulan
Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten kotabaru	<i>Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor</i>	216 buah/21 unit
	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	25 buah/unit
	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	137 buah/unit
	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	4 unit
	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	50 unit/buah
	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	3 unit
	Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala	6 unit

	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional	130 kali utk 13 mobil jabatan
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	25 unit
	Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan/ instalasi air, listrik dan telepon rumah jabatan/dinas	4 pekerjaan pemeliharaan
	Jumlah pemeliharaan jaringan air, listrik dan telepon gedung kantor	3 unit
	<i>Terpenuhinya disiplin terhadap aparatur</i>	304 stel dan 385 baju
	Jumlah pakaian dinas pegawai yang tersedia	304 stel
	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	385 baju
	Jumlah pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya	235 pakaian olahraga
	<i>Terpenuhinya pelayanan informasi publik</i>	19 website
	Jumlah pelaksanaan deseminasi dan pendistribusian media baru (website)	19 website
	<i>Tingkat pengembangan pengamanan rahasia negara</i>	216 kali
	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sistem persandian	150 kali
	Jumlah pelaksanaan pembinaan gelar peralatan sandi di instansi pemerintah	66 kali
	<i>Terciptanya layanan informasi KDH/WKDH</i>	120 klipng Naskah sambutan Bupati/wkl. Bupati
	Jumlah klipng naskah sambutan KDH/WKDH yang tersedia	120 klipng Naskah sambutan Bupati/wkl. Bupati
	<i>Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan</i>	35 dokumen
	Jumlah dokumen laporan peningkatan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	3 dokumen
	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen
	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	2 dokumen
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen (Lap. Keu Akhir Tahun)
	Jumlah dokumen monitoring & pengendalian evaluasi pelaporan kinerja SKPD	180 buku (2 dokumen)
	Jumlah dokumen penyusunan instrumen/kelengkapan capaian kinerja dan keuangan SKPD	24 dokumen
Meningkatnya tugas kedinasan KDH/WKDH	<i>Terlaksananya Pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH</i>	354 kali
	Jumlah kegiatan dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan	22 kali rapat
	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara	35 kali penerimaan kunjungan
	Jumlah rapat koordinasi unsur muspida	15 kali
	Jumlah rapat koordinasi di lingkungan pemda	36 kali

	Jumlah kunjungan kerja/inspeksi KDH / Wakil KDH	37 kali
	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda	72 kali
	Jumlah pelayanan rumah tangga KDH / Wakil KDH	24 kali
	Jumlah penyediaan peralatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	33 (25 set peralatan olahraga & 8 kali pemeliharaan kesehatan)
	Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon dan air	84 (12 x 7 rekening)
	Jumlah penyediaan tenaga kebersihan kantor	12 kali utk 6 orang (penyediaan alat kebersihan)
	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	39 jenis ATK selama 12 bulan
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 kali (6 macam barang cetakan)
	Jumlah pakaian dinas KDH/ Wakil KDH	116 stel
	Jumlah jurnal/buletin kegiatan bupati / wakil bupati	12 bulan (1 buletin x 100 exemplar)
	<i>Terlaksananya pelayanan kedinasan pimpinan daerah</i>	3 kegiatan
	Jumlah pengembangan sistem ketatausahaan pimpinan daerah	3 kegiatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan	<i>Tingkat pemenuhan pembentukan organisasi sesuai ketentuan dan kebutuhan daerah, penyampaian laporan pemda serta terlaksananya kepastian hukum dalam permasalahan batas wilayah administrasi pemerintah</i>	100%
	Jumlah SOTK perangkat daerah yang dievaluasi	32 Rancangan Perkada
	Jumlah dokumen pembinaan	2 dokumen
	Jumlah pengadaan buku administrasi kecamatan dan kelurahan	21 kec.
	Jumlah laporan penyelenggaraan pemda	80 buku
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	25 kecamatan
	Jumlah kabupaten, kecamatan dan desa yang difasilitasi	22 (2 gerbang bats. Kec. 10 gerbang bts desa, 5 usulan nama pembakuan papan bumi, 5 fasilitas bts kab.kec.& desa)
	Jumlah fasilitasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	10 kali
	Jumlah fasilitasi pemekaran kecamatan	2 kec
	Jumlah fasilitasi otonomi daerah	10 kali
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan	1 kali
	<i>Terlaksananya payung hukum bagi pemerintah daerah dalam bekerjasama dengan pihak lain</i>	31 kali
	Jumlah pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pembinaan tindak lanjut kerjasama antar daerah perbatasan	4 kali
	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah	27 kali

	Jumlah paket kajian kelembagaan pranata kerjasama pembangunan daerah	2 paket
Meningkatnya Penyebarluasan Hasil – hasil Pembangunan Daerah	<i>Terciptanya promosi dan penyebarluasan hasil pembangunan daerah</i>	8 kali
	Jumlah pameran dan peringatan hari jadi	1 kali
	Jumlah peringatan hari besar yang dilaksanakan	6 kali
	Jumlah partisipasi untuk mengikuti pameran pembangunan/potensi daerah dan peringatan hari jadi	1 kali
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<i>Terlaksananya ketaatan masyarakat dan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan</i>	20 perda/perbup
	Jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap	7 perkara perdata & TUN
	Jumlah raperda yang akan ditetapkan menjadi perda	20 perda/perbup
	Jumlah kualitas raperda yang ditetapkan menjadi perda	20 perda
	Jumlah fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Dokumen Himp.Lembaran Negara
	Jumlah publikasi warta perundang-undangan	194 buah
	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	20 perda
	Jumlah peserta kegiatan rencana aksi nasional hak asasi manusia	120 orang
	Meningkatkan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat Ukuran	<i>Tersusunnya penataan struktur organisasi yang efektif dan efisien</i>
Jumlah dokumen pelaksanaan penataan kelembagaan		1 dokumen
Jumlah dokumen SOP Perangkat Daerah yang disusun		1 dokumen
Jumlah dokumen SOTK perangkat daerah yang di ISO		1 dokumen
Jumlah dokumen Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD		1 dokumen
Jumlah SKPD yang dilakukan Analisis Beban Kerja		56 SKPD
Jumlah dokumen jabatan fungsional yang disusun		2 dokumen
Jumlah fasilitasi pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa		1 keg
Jumlah dokumen SOP SKPD yang disusun		2 (1 dokumen, 1 paket notebook & aplikasi program)
Jumlah dokumen Anjab yang disusun		56 SKPD dan Kecamatan
Jumlah pelaksanaan penataan reformasi birokrasi		1 dokumen
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		<i>Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah daerah bebas KKN</i>
	Jumlah pejabat penyelenggara negara yang mengisi LHKPN	1 berkas (100 dokumen LHKPN)

	Jumlah dokumen LAKIP tingkat Kabupaten	1 dok.LAKIP Tahun 2015
	Jumlah dokumen pelaporan aksi PPK	4 (4 dok.Lap. RAN & RAD)
	Jumlah dokumen Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1 dokumen
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	<i>Tersedianya peningkatan wawasan sumber daya aparatur</i>	710 orang
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	600 orang
	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	50 orang
	Jumlah diklat bidang pemerintahan umum	60 orang
	<i>Tersedianya pembinaan dan pengembangan aparatur</i>	1250 buah
	Jumlah pengadaan kartu tanda pengenal	1250 buah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<i>Terlaksananya layanan kegiatan sertifikasi lahan sesuai dengan tata ruang</i>
Jumlah paket pencadangan tanah		2 paket pengadaan
Jumlah tanah pemda yang di inventarisasi dan di sertifikasi		55 (30 desa keg.inventarisasi, dan 25 sertifikasi tanah pemda)
jumlah lahan perusahaan		5 izin lokasi
jumlah lahan perusahaan		7 layanan fasilitas
<i>Penyelesaian mediasi konflik-konflik pertanahan</i>		12 kasus
Jumlah fasilitasi kasus penyelesaian konflik- konflik pertanahan di Kabupaten Kotabaru		12 kasus
Meningkatnya Kualitas Sosial, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	<i>Terlaksananya kelancaran pendistribusian raskin ke kecamatan pemberian bantuan ke obyek sasaran dan kelancaran koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka fasilitasi penanggulangan pasca bencana</i>	80 koordinasi, 60 kegiatan
	Jumlah koordinasi/ fasilitasi kecamatan untuk penyerahan bantuan kepada organisasi keagamaan, tempat ibadah, ponpes dll.	20 koordinasi
	Jumlah penyediaan/ penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan masyarakat.	60 keg (19 organisasi)
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi, validasi database bantuan keagamaan kepala daerah	20 kali koordinasi
	Jumlah koordinasi, fasilitasi pembinaan pendidikan, pemuda olahraga dan kebudayaan	20 koordinasi
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kesehatan, kesejahteraan sosial dan raskin	20 koordinasi / fasilitasi
	<i>Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan fasilitas bidang ekonomi</i>	10 dokumen
	Jumlah dokumen pengelolaan SDA	1 dokumen

	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan SDA dan mineral disertai pelayanan	1 dokumen
	Jumlah dokumen koordinasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet	1 dok (10 x rapat)
	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dan pengumpulan data produksi daerah (pertanian umum)	4 dokumen
	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan data pengendalian inflasi	1 dokumen
	Jumlah dokumen sosialisasi tentang pengendalian stabilisasi faktor pemicu/penahan inflasi daerah	1 dok (40 orang)
	Jumlah dokumen koordinasi dan pengumpulan data distribusi bahan pangan	1 dokumen
	<i>Terlaksananya kegiatan kerjasama pembangunan</i>	1 dokumen
	Jumlah dokumen fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	1 dokumen
	<i>Terlaksananya kegiatan pendukung pendapatan daerah</i>	2 dokumen
	Jumlah dokumen fasilitasi Pendirian, Peningkatan & Pengembangan BUMD	1 dokumen
	Jumlah dokumen monitoring & evaluasi BUMD/ BUMDes yg dibuat	1 dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing Bagian – Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru dan target sasaran dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 dan Renja Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

A. PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru diukur berdasarkan isu-isu dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja berdasarkan kategorisasi pencapaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori yaitu :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	< 75 % sampai 100 %	Berhasil
III	< 50 % sampai 75 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 50 %	Kurang Berhasil

berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2016 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan indikator kegiatan, target dan realisasi adalah :

Capaian kinerja pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah surat masuk dan keluar	60.000 Lembar Surat	60.000 Lembar Surat	100 %
2	Jumlah tagihan rekening telepon, air, listrik dan Internet	600 kali jasa rekening	600 Jumlah kali jasa rekening	100 %
3	Jumlah penyediaan jasa sewa asrama mahasiswa & Mes Pemd	950 orang	950 orang	100 %
4	Jumlah pemeliharaan kend. dinas/ operasional, BBM, penyeberangan ferry & pergantian suku cadang	70 unit	70 unit	100 %
5	Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan & pengelolaan keuangan	2.798 orang	2.798 orang	100 %
6	Jumlah pembayaran jasa kebersihan gedung kantor	380 kali	380 kali	100 %
7	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja lingkup setda	1.321 kali	1.321 kali	100 %
8	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	396 set	396 set	100 %
9	Jumlah penyediaan barang cetakan & penggandaan	72 set	72 set	100 %
10	Jumlah penyediaan komponen listrik/BBM dan sparepart ginset	108 set	108 set	100 %
11	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	324 jenis	324 jenis	100 %
12	Jumlah penyediaan media masa surat kabar	12 jenis	12 jenis	100 %
13	Jumlah penyediaan makan minum pegawai dan tamu	110.160 orang kali	110.160 orang kali	100 %
14	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yg diikuti	525 kali	525 kali	100 %
15	Jumlah penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran & keamanan	2.798 org kali bln	2.798 orang kali bln	100 %
16	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yg diikuti	208 orang kali	208 orang kali	100 %
17	Jumlah penyediaan jasa pengumuman & propaganda	7 media nasional/daerah	7 media nasional/daerah	100 %
Rata – rata capaian				100 %

Untuk penyediaan media masa surat kabar banyaknya koran daerah yang belum terakomodir terutama untuk pemberitaan yang memuat pembangunan daerah sehingga

perlunya diberikan porsi lebih banyak mengenai pemberitaan pembangunan daerah. Untuk penyediaan jasa pengumuman & propaganda pemberitaan tentang Pemerintah Daerah melalui advertorial tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya pembatasan ruang/kolom pada media tersebut sehingga perlunya pembicaraan dengan pimpinan media agar dapat diberikan ruang advertorial sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diatas yaitu 100 %, ini termasuk kategori **berhasil**,

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

No.	Indikator	Target 2016	Realisai 2016	% Capaian
1	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	25 bh/unit	24 bh/unit	96 %
2	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung Kantor	137 bh/unit	137 bh/unit	100 %
3	Jumlah pelaksanaan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	4 unit	2 unit	50 %
4	Jumlah pengadaan peralatan gedung Kantor	50 unit/buah	50 unit/buah	100 %
5	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	3 paket	3 paket	100 %
6	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor secara berkala	6 unit	6 unit	100 %
7	Jumlah kali pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas / operasional	120 kali utk mobil jabatan	92 kali	70,77 %
8	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25 unit	25 unit	100 %
9	Jumlah pemeliharaan jaringan air, listrik & telepon rumah jabatan/dinas	4 pekerjaan pemeliharaan	4 pekerjaan pemeliharaan	100 %
10	Jumlah pemeliharaan jaringan air, listrik & telepon gedung kantor	3 paket	3 paket	100 %
Rata – rata capaian				92,07 %

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur diatas yaitu 92,07 %, ini termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No.	Indikator	Target 2016	Realisai 2016	% Capaian
1	Jumlah seragam/stel pakaian dinas	304 stel pakaian dinas	304 stel pakaian dinas	100 %
2	Jumlah seragam/stel pakaian khusus hari-hari tertentu	385 stel pakaian batik	385 stel pakaian batik	100 %
3	Jumlah stel pakaian olahraga	235 stel pakaian olah raga	235 stel pakaian olah raga	100 %

Rata – rata capaian	100 %
---------------------	-------

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur diatas yaitu 100 %, ini termasuk kategori **berhasil**

Capaian Kinerja pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah orang mengikuti sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan	600 orang	450 orang	75 %
2	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	50 orang	0 orang	0 %
3	Jumlah org yang melaksanakan Diklat Bidang Pemerintahan Umum	60 orang	60 orang	100 %
Rata – rata capaian				88 %

Untuk kegiatan Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan capaian 0 % karena tidak dapat dilaksanakan sehubungan adanya pemotongan anggaran. Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur diatas yaitu 88 %, ini termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah dokumen laporan Peningkatan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100 %
2	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	2 dokumen	100 %
3	Jumlah dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100 %
4	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	2 dokumen	2 dokumen	100 %
5	Jumlah dok. monitoring & pengendalian evaluasi pelaporan kinerja SKPD	150 buku (2 dokumen)	150 buku (2 dokumen)	100 %
6	Jumlah dok laporan Instrumen/kelengkapan capaian kinerja dan keuangan SKPD	24 buku (2 dokumen)	24 (2 dokumen)	100 %
Rata – rata capaian				100 %

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan diatas yaitu 100 %, ini termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Kerjasama Pembangunan

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah dokumen koordinasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Rata – Rata Capaian				100 %

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Kerjasama Pembangunan diatas yaitu 100 %, ini termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1.	Jumlah paket pencadangan tanah untuk kegiatan pembangunan	2 paket	1 paket	50 %
2.	Jumlah kegiatan tanah pemda yg di Inventarisasi & Sertifikasi	55 kegiatan (30 desa, 25 sertifikat)	37 (30 desa, 7 sertifikat)	67,27 %
3.	Jumlah pelayanan ijin lokasi lahan perusahaan	5 ijin lokasi	tidak terlaksana	0 %
4	Jumlah layanan fasilitas	7 layanan	5 layanan	71 %
Rata – rata capaian				51,40 %

Pada kegiatan cadangan tanah untuk pembangunan hanya sebagian paket pengadaan tanah yang bisa dilaksanakan, selebihnya ada hibah tanah dari masyarakat. Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah diatas yaitu 51,40 %, ini termasuk kategori **cukup berhasil**

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah kegiatan dialog/ audiensi dgn tokoh masy., organisasi sosial kesyarakatan	22 kali rapat	21 kali rapat	95 %
2	Jumlah kunjungan kerja pejabat Negara	35 kali	35 kali	100 %
3	Jumlah rapat koordinasi unsur muspida	15 kali	15 kali	100 %
4	Jumlah rapat koordinasi di lingkungan Pemda	36 kali	33 kali	91,67 %
5	Jumlah perjalanan dinas /kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH	37 kali	37 kali	100 %
6	Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat & pemda	72 kali	72 kali	100 %
7	Jumlah pelayanan rumah tangga KDH / WKDH	24 kali	24 kali	100 %

8	Jumlah penyediaan peralatan olahraga & pemeriksaan kesehatan KDH dan WKDH	33 (25 set peralatan & 8 kl pemeliharaan kes)	13 (25 set peralatan & 8 kl pemeliharaan kes)	39,39 %
9	Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon & air	84 rekening	84 rekening	100 %
10	Jumlah penyediaan tenaga kebersihan kantor	1 thn	1 thn	100 %
11	Jumlah penyediaan jenis alat tulis kantor	39 jenis ATK	39 jenis ATK	100 %
12	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 kali (6 macam brg cetakan)	4 kali (6 macam brg cetakan)	100 %
13	Jumlah pakaian dinas KDH/WKDH	116 stel	90 stel	77,59 %
14	Jumlah Jurnal/Buletin Kegiatan Bupati /Wakil Bupati	12 bln (1 buletin x 100 exemplar)	12 bln	100 %
Rata – rata capaian				97,90 %

Untuk jurnal/buletin kegiatan KDH/WKDH sering mengalami perubahan jadwal, dikarenakan belum terencananya kegiatan yang akan dilakukan sehingga diperlukan aplikasi yang menghubungkan antara kegiatan KDH/WKDH dengan Kepala Perangkat Daerah. Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH diatas yaitu 97,90 %, ini termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah mediasi kasus penyelesaian konflik- konflik pertanahan di Kab.Kotabaru	12 kasus	8 kasus	66,67 %
Rata – rata capaian				66,67 %

Untuk kegiatan mediasi kasus penyelesaian konflik pertanahan disebabkan masih kurangnya/terbatasnya tenaga SDM/staf yang membantu kelengkapan sehingga capaian tidak maksimal. Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan diatas yaitu 66,67 %, ini termasuk kategori **cukup berhasil**

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah desimenasi dan pendistribusian media baru (website)	19 website	19 website	100 %
Rata – rata capaian				100 %

Untuk pendistribusian media baru (website) belum adanya road map pembuatan aplikasi berbasis web untuk mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah dan masih kurangnya tenaga terampil untuk pembuatan website di Perangkat Daerah, sehingga perlunya pengembangan SDM dan road map guna menganalisis kebutuhan pengguna baik masyarakat maupun Perangkat Daerah pengguna. Dari rata – rata capaian indikator

kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik diatas yaitu 100 %, ini termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah dokumen pejabat penyelenggara negara yg mengisi LHKPN	100 dokumen	100 dokumen	100 %
2	Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	Jumlah dokumen pelaporan aksi ppk	4 dok lap.RAN & RAD	0,37 dok	9,17 %
4	Jumlah dokumen penyusunan SAKIP	1 dok	1dok	100 %
Rata – rata capaian				98,23 %

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH diatas yaitu 98,23 %, ini termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah buku bacaan naskah sambutan KDH dan WKDH	100 klifing naskah KDH/WKDH	100 klifing naskah KDH/WKDH	100 %
Rata – rata capaian				100 %

Untuk naskah sambutan Kepala Daerah terkadang hanya memberikan gambaran umum tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tidak menggambarkan histori dari kegiatan yang dilakukan, juga belum adanya standar baku tentang model pembuatan naskah pidato sambutan Kepala Daerah. Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi diatas yaitu 100 %, termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah pelaksanaan monitoring pengawasan dan pembinaan	4 kali	2 kali	50 %
2	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah	27 kali	27 kali	100 %
3	Jumlah paket kajian kelembagaan pranata kerjasama pembangunan	2 paket	2 paket	100 %

Rata – rata capaian	99,30 %
---------------------	---------

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Peningkatan Kerja Sama antar Pemerintah Daerah diatas yaitu 99,30 %, termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah perkara ditangani yang mempunyai kekuatan hukum tetap	7 perkara perdata dan TUN	7 perkara perdata dan TUN	100 %
2	Jumlah raperda/raperbup yg akan ditetapkan menjadi perda/perbup	20 perda/perbup	20 perda/perbup	100 %
3	jumlah kualitas Raperda yg ditetapkan menjadi Perda	20 perda	19 perda	95 %
4	Jumlah fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
5	Jumlah media publikasi warta peraturan perundang-undangan	194 buah	184 buah	94,85 %
6	Jumlah kajian peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	20 perda	12 perda	60 %
7	Jumlah peserta peningkatan, pemahaman pemenuhan dan penghormatan HAM	120 orang	50 orang	42 %
Rata – rata capaian				94,44 %

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Penataan Peraturan Perundang-undangan diatas yaitu 94,44 %, termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Penataan Daerah Otonomi Baru

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah SOTK perangkat daerah yang dievaluasi	32 rancangan perkada	32 rancangan perkada	100 %
2	Jumlah dokumen pembinaan ketatalaksanaan	2 dokumen	2 dokumen	100 %
3	Jumlah pengadaan buku administrasi kecamatan dan kelurahan	21 kecamatan	21 kecamatan	100 %
4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen (80 buku)	1 dokumen (80 buku)	100 %
5	Jumlah peserta yg mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah otonom	25 org (21 kec & 4 kelurahan)	0	0 %
		22 (2 gerbang batas kec, 10	18 (2 gerbang	

6	Jumlah fasilitasi kegiatan di kabupaten, kecamatan dan desa	batas desa, 5 usulan nama pembakuan papan bumi & 5 fasilitasi batas kab,kec & desa	batas kec, 10 batas desa, usulan nama pembakuan rupa bumi & 6 fasilitasi batas kabupaten, kecamatan & desa	81,82 %
7	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yg dilaksanakan	10 kali	4 kali	40 %
8	Jumlah fasilitasi pemekaran kecamatan	2 kec	2 kec	100 %
9	Jumlah fasilitasi otonomi daerah	10 kali	10 kali	100 %
10	Jumlah pelaksanaan tugas pembantuan	1 kali	1 kali	100 %
Rata – rata capaian				87,71 %

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Penataan Daerah Otonomi Baru diatas yaitu 87,71 %, termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah dokumen penataan kelembagaan	1 dok (buku penataan kelembagaan)	1 dok (buku penataan kelembagaan)	100 %
2	Jumlah dokumen SOP SKPD yg disusun	1 Dokumen	1 dokumen	100 %
3	Jumlah SOTK perangkat daerah yg di ISO	1 SOTK	1 SOTK	100 %
4	Jumlah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %
5	jumlah SKPD yg dilakukan analisis beban kerja	56 (35 SKPD dan 21 kec)	56 (35 SKPD dan 21 kec)	100 %
6	Jumlah dokumen formasi Jabatan fungsional	1 dokumen	1 dokumen	100 %
7	Jumlah Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1 tahun	1 tahun	100 %
8	Jumlah dokumen penyusunan SOP SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100 %
9	Jumlah dokumen penyusunan analisis jabatan	56 SKPD	56 SKPD	100 %
10	Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi & penataan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Rata – rata capaian				100 %

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Penataan Organisasi diatas yaitu 100 %, termasuk kategori **Berhasil**

Capaian kinerja pada Program Fasilitas Peningkatan dan Penanganan Sosial, Budaya dan Agama

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah koordinasi fasilitasi kecamatan utk penyerahan bantuan kepada organisasi keagamaan, tempat ibadah dan ponpes	20 koordinasi	16 koordinasi	80,25 %
2	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan masyarakat	60 keg (utk 9 organisasi)	39 keg (utk 9 organisasi)	65 %
3	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi database keagamaan kpd daerah	20 kl koordinasi	14 kali	70 %
4	Jumlah koordinasi pembinaan pendidikan, pemuda olahraga dan kebudayaan	20 koordinasi	13 koordinasi	65 %
5	Jumlah koordinasi fasilitasi pelaksanaan kesehatan, kesos dan raskin	20 koordinasi	17 koordinasi	85 %
Rata – rata capaian				65 %

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Fasilitas Peningkatan dan penanganan Sosial, Budaya dan Agama diatas yaitu 65 %, termasuk kategori **Cukup berhasil**

Capaian kinerja pada Program Fasilitas Pembinaan dan Peningkatan Bidang Ekonomi

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah dokumen pengelolaan SDA	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	Jumlah dokumen monitoring & evaluasi pengelolaan SDA dan mineral disertai pelayanan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	Jumlah dokumen pelayanan izin pengelolaan & perusahaan sarang burung walet	1 dokumen	1 dokumen	100 %
4	Jumlah dok koordinasi penyusunan & pengumpulan data produksi daerah (pertanian umum)	4 dokumen	4 dokumen	100 %
5	Jumlah dok koordinasi penyusunan laporan data pengendalian inflasi	1 dokumen	1 dokumen	100 %
6	Sosialisasi tentang pengendalian stabilisasi faktor pemicu/penahan inflasi daerah	1 dokumen	1 dokumen	100 %
7	Jumlah dokumen koordinasi dan pengumpulan data distribusi bahan pangan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Rata – rata capaian				100 %

Pada kegiatan monitoring yaitu adanya pemantauan keadaan mineral, migas dan PLN. Untuk kegiatan pelayanan izin sarang burung walet masih perlunya mengumpulkan data pemilik bangunan sarang burung walet di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru dikarenakan tidak adanya permohonan dari pengusaha sarang

burung walet untuk membuat izin. Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Bidang Ekonomi diatas yaitu 100 %, termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Usaha Milik Daerah

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah dokumen BUMD yg dibuat	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	Jumlah dokumen monitoring & evaluasi BUMD/ BUMDes yg dibuat	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Rata – rata capaian				100 %

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Peningkatan Usaha Milik Daerah diatas yaitu 100 %, termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonomi

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah pameran dan peringatan hari jadi yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	100 %
2	Jumlah peringatan hari besar yang dilaksanakan	6 kali	6 kali	100 %
3	Jumlah partisipasi untuk mengikuti pameran pembangunan /potensi daerah & peringatan hari jadi	1 kali	1 kali	100 %
Rata – Rata Capaian				100 %

Untuk partisipasi dalam pameran pembangunan hanya dilakukan 1 (satu) kali saja , sehingga pameran yang dilakukan diluar Kabupaten Kotabaru tidak bisa diikuti dikarenakan keterbatasan anggaran. Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonomi diatas yaitu 100 %, termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah pengadaan kartu tanda pengenal	1.250 buah	1.250 buah	100 %
Rata – rata capaian				100 %

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur diatas yaitu 100 %, termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
-----	-----------	-------------	----------------	-----------

1	Jumlah peserta pembinaan system persandian	150 orang	150 orang	100 %
2	Jumlah gelar peralatan sandi di instansi pemerintah	60 buah	60 buah	100 %
Rata – Rata Capaian				100 %

Untuk sosialisasi penyelenggaraan informasi publik sesuai dengan draf perbup Kotabaru tentang pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, untuk gelar peralatan sandi masih belum adanya sandiman maka perlunya diisi jabatan fungsional sandiman. Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara diatas 100 %, ini termasuk kategori **berhasil**

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah

No.	Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
1	Jumlah penyusunan Sistem Informasi ketata usahaan pimpinan berbasis IT	3 pekerjaan (9 SOP, 1 penjajakan korespondensi IT, 65 adm surat menyurat)	3 pekerjaan (9 SOP, 1 penjajakan korespondensi IT, 65 adm surat menyurat)	100 %
Rata – rata capaian				100 %

Dari rata – rata capaian indikator kegiatan pada Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara diatas yaitu 100 %, termasuk kategori **berhasil**

C. PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TAHUN LALU

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2016 dengan tahun yang lalu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan indikator kegiatan dan realisasi kinerja pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru adalah :

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Indikator	Kinerja 2015		Kinerja 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah surat masuk dan keluar	6.000 lembar surat	100 %	60.000 Lembar Surat	100 %
2	Jumlah tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet	600 kali jasa rekening	68,5 %	600 kali jasa rekening	100 %
3	Jumlah penyediaan jasa asrama mahasiswa dan mes pemda	950 org	100 %	950 orang	100 %
4	Jumlah pemeliharaan kend. dinas/ operasional, BBM, penyeb.ferry & pergantian suku cadang	70 unit	100 %	70 unit	100 %

5	Jumlah pembayaran jasa adm. Keuangan dan pengelolaan keuangan	2.798 orang	90 %	2.798 orang	100 %
6	Jumlah pembayaran jasa kebersihan gedung kantor	380 kali	100 %	380 kali	100 %
7	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja lingkup Setda	1.321 kali	100 %	1.321 kali	100 %
8	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	396 set	100 %	396 set	100 %
9	Jumlah penyediaan barang cetakan & penggandaan	72 set	100 %	72 set	100 %
10	Jumlah penyediaan komponen listrik/BBM dan sparepart ginset	108 set	100 %	108 set	100 %
11	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	324 jenis	100 %	324 jenis	100 %
12	Jumlah penyediaan media masa surat kabar	12 jenis	100 %	12 jenis	100 %
13	Jumlah penyediaan makan minum pegawai dan tamu	110.160 org kali	100 %	110.160 org kali	100 %
14	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	525 kali	100 %	525 kali	100 %
15	Jumlah penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran & keamanan	2.798 org kali bln	100 %	2.798 org bln	100 %
16	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	208 org kali	100 %	208 org kali	100 %
17	Jumlah penyediaan jasa pengumuman & propaganda	7 media nasional/daerah	100 %	7 media nasional/daerah	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

No.	Indikator	Kinerja 2015		Kinerja 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	25 bh/unit	100 %	24 bh/unit	96 %
2	Jumlah paket pengadaan perlengkapan ged. Kantor	360 buah/unit	99,72 %	137 buah/unit	100 %
3	Jumlah pelaksanaan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	2 jenis barang	100 %	2 Jenis barang	50 %
4	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	101 unit/buah	100 %	50 unit/buah	100 %
5	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	3 paket	100 %	3 paket	100 %
6	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	7 unit/pekerjaan	100 %	6 unit/pekerjaan	100 %
7	Jumlah kali Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas / operasional	84 kali	64.62 %	92 kali	70.77 %
8	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/	21 unit	84 %	25 unit	100 %

	operasional				
9	Jumlah pemeliharaan jaringan air, listrik & telepon rumah jabatan/dinas	4 pekerjaa n (3 pemeliha raan & penamba han daya listrik	100 %	4 pekerjaa n (3 pemeliha raan & penamba han daya listrik	100 %
10	Jumlah pemeliharaan jaringan air, listrik & telepon gedung Kantor	3 paket	100 %	3 paket	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah seragam/stel pakaian dinas	304 stel	100 %	304 stel	100 %
2	Jumlah seragam/stel pakaian khusus hari-hari tertentu	385 stel pakaian Batik	100 %	385 stel pakaian Batik	100 %
3.	Jumlah stel pakaian olahraga	235 stel pakaian olah raga	100 %	235 stel pakaian olahraga	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2015 dan 2016 pada Program Sumber Daya Aparatur

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1.	Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan	600 orang (300 peserta sosialisas i & 300 peserta penyuluh an hokum	100 %	450 org	75 %
2.	Jumlah aparatur yg mengikuti bimbingan tekhnis peraturan perundang-undangan	50 orang	100 %	Tdk terlaksana	0 %
3.	Jumlah org yg melaksanakan diklat bidang pemerintahan umum	50 orang	100 %	60 org	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No.	Indikator	Target 2015	Target 2016
-----	-----------	-------------	-------------

		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah dokumen laporan peningkatan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	100 %	3 dokumen	100 %
2	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	100 %	2 dokumen	100 %
3	Jumlah dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	2 dokumen	100 %	2 dokumen	100 %
4	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	2 dokumen	100 %	2 dokumen	100 %
5	Jumlah dokumen monitoring & pengendalian evaluasi pelaporan kinerja SKPD	168 buku (2 dokumen)	100 %	150 buku (2 dokumen)	100 %
6	Jumlah dokumen laporan Instrumen/kelengkapan capaian kinerja dan keuangan SKPD	24 buku (2 dokumen)	100 %	24 buku (2 dokumen)	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Kerjasama Pembangunan

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah dokumen koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Penataan, penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1.	Jumlah paket pencadangan tanah untuk kegiatan pembangunan	1 paket	33.33 %	1 paket	100 %
2.	Jumlah kegiatan tanah pemda yg di inventarisasi & sertifikasi	42 keg (30 ds & 12 sertifikat)	76.36 %	37 keg (30 desa & 7 sertifikat)	67,27 %
3.	Jumlah pelayanan izin lokasi lahan perusahaan	10 lahan perusahaan	100 %	Tdk terlaksana	0 %
4	Jumlah layanan fasilitasi			5 layanan	71 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

No.	Indikator	Target 2015	Target 2016
------------	------------------	--------------------	--------------------

		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, organisasi sosial kesyarakatan	20 kali rapat	95 %	21 kali rapat	95 %
2	Jumlah kunjungan kerja pejabat Negara	15 kali	100 %	35 kali	100 %
3	Jumlah rapat koordinasi unsur muspida pemda	10 kali	83.33 %	15 kali	100 %
4	Jumlah rapat koordinasi di lingkungan pemda	20 kali	55.56 %	33 kali	91,67 %
5	Jumlah perjalanan dinas/ kunjungan kerja/inspeksi KDH / WKDH	28 kali	50.91 %	37 kali	100 %
6	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda	63 kali	87.50 %	72 kali	100 %
7	Jumlah pelayanan rumah tangga KDH/WKDH	24 kali	100 %	24 kali	100 %
8	Jumlah penyediaan peralatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan KDH dan WKDH	9 set peralatan olahraga	45 %	13 (25 set peralatan & 8 kl pemeliha raan kes	39,39 %
9	Terbayarnya Rek. listrik, telepon & air	84 rekening	100 %	84 rekening	100 %
10	Jumlah penyediaan tenaga kebersihan kantor	1 thn	100 %	1 thn	100 %
11	Jumlah penyediaan jenis alat tulis kantor	19 Jenis ATK	79.17 %	39 jenis ATK	100 %
12	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 kali (6 macam brg cetakan)	100 %	4 kali (6 macam brg cetakan)	100 %
13	Jumlah pakaian dinas KDH/ Wakil KDH	54 stel	46.55 %	90 stel	77,59 %
14	Terlaksananya Jurnal/Buletin Kegiatan Bupati / Wakil Bupati	12 bln (1 buletin x 100 exampler)	100 %	12 bln (1 buletin x 100 exampler)	100 %

**Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan**

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Terfasilitasinya kasus penyelesaian konflik- konflik pertanahan di Kab. Kotabaru	15 kasus	100 %	8 kasus	66,67 %

**Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik**

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Terfasilitasinya pendistribusian media baru (website)	36 kali (18 kec & 15 SKPD)	94.74 %	19 website	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah dokumen pejabat penyelenggara negara yg mengisi LHKPN	100 dokumen	100 %	100 dokumen	100 %
2	Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
3	Jumlah dokumen pelaporan aksi ppk	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
4	Jumlah dokumen penyusunan SAKIP	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah buku bacaan naskah KDH dan WKDH	130 klifing naskah KDH/WKDH	86.67	100 klifing naskah KDH/WKDH	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah pelaksanaan monitoring, pengawasan & pembinaan	2 kali	100 %	2 kali	50 %
2	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah	6 kali	100 %	27 kali	100 %
3	Jumlah paket kajian kelembagaan pranata kerjasama Pembangunan	2 paket	100 %	2 paket	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah perkara ditangani yang mempunyai kekuatan hukum tetap	11 perkara	100 %	7 perkara	100 %
2	Jumlah raperda/raperbup yang akan ditetapkan menjadi perda/perbup	30 perda	100 %	20 perda/perbup	100 %
3	Jumlah kualitas raperda yg ditetapkan menjadi perda	30 perda	100 %	19 perda	95 %
4	Jumlah dokumen sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
5	Jumlah media publikasi warta perundang-undangan	222 buah	100 %	184 buah	94,85 %
6	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi & keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	20 perda	100 %	12 perda	60 %
7	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan, pemahaman pemenuhan dan penghormatan HAM	150 orang	100 %	50 orang	42 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Penataan Daerah Otonomi Baru

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah SOTK perangkat daerah yang dievaluasi	2 dok (buku simbaga & SOTK)	100 %	32 rancangan perkada	100 %
2	Jumlah dokumen pembinaan ketatalaksanaan	3 dok (PerbubTN D,Tata Kearsipan & Pakaian Dinas)	100 %	2 dok	100 %
3	Jumlah pengadaan buku administrasi kec. & kelurahan	2 kali (2 kec,4 kelurahan)	66.67 %	21 kecamatan	100 %
4	Jumlah dokumen laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen	100 %	1 dokumen (80 buku)	100 %
5	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Otonom	25 org (21 kec & 4 kelurahan)	100 %	Tdk terlaksana	0 %
6	Jumlah fasilitasi kegiatan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa	17 (2 gerbang bts kec, 10 bts ds, 5 usulan nama pembakuan papan bumi	77.27 %	18 (2 gerbang bts kec, 10 bts ds, 5 usulan nama pembakuan papan bumi	81,82 %

		& 5 fasilitas bts kab,kec & ds		& 5 fasilitas bts kab,kec & ds	
7	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pem.umum yg dilaksanakan	10 kali	50 %	4 kali	40 %
8	Jumlah Pemekaran Kecamatan yg difasilitasi	1 kec	50 %	2 kec	100 %
9	Jumlah fasilitas Otonomi Daerah	10 kali	100 %	10 kali	100 %
10	Jumlah pelaksanaan tugas pembantuan	1 kali	100 %	1 kali	100 %

**Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2015 dan 2016
Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah**

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah dokumen pelaksanaan penataan kelembagaan	1 dokumen (buku penataan kelembagaan)	100 %	1 dokumen (buku penataan kelembagaan)	100 %
2	Jumlah dokumen SOP SKPD yg disusun	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
3	Jumlah SOTK perangkat daerah yang di ISO	1 SOTK	100 %	1 SOTK	100 %
4	Jumlah dokumen penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
5	Jumlah SKPD yg dilakukan analisis beban kerja	56 (35 SKPD & 21 kec)	100 %	56 (35 SKPD & 21 kec)	100 %
6	Jumlah dokumen formasi jabatan fungsional	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
7	Jumlah pelaksanaan unit layanan pengadaan barang/jasa	1 tahun	100 %	1 tahun	100 %
8	Jumlah dokumen penyusunan SOP SKPD	16 SKPD	100 %	2 dokumen	100 %
9	Jumlah dokumen penyusunan analisis jabatan	36 SKPD	100 %	56 SKPD	100 %
10	Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi dan penataan	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %

**Perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2015 dan 2016 pada
Program Fasilitas Peningkatan dan Penanganan Sosial, Budaya dan Agama**

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah koordinasi fasilitas kecamatan untuk penyerahan bantuan kepada organisasi keagamaan, tempat ibadah, ponpes.	9 kec	42.86 %	16 koordinasi	80,25 %
2	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelayanan	44 keg (utk 9	73.33 %	39 keg (utk 9	65 %

	kesejahteraan masyarakat.	organisasi)		organisasi)	
3	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi, validasi database bantuan keagamaan kepada daerah	9 kec	42.86 %	14 kali (9 kec)	70 %
4	Jumlah koordinasi pembinaan pendidikan, pemuda olahraga dan kebudayaan	2 koordinasi (8 kecamatan)	38.10 %	13 koordinasi (8 kecamatan)	65 %
5	Jumlah koordinasi fasilitasi pelaksanaan kesehatan, kesos dan raskin	4 Kec	19.05 %	17 Koordinasi(4 kec)	85 %

**Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016
Program Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Bidang Ekonomi**

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah dokumen pengelolaan SDA	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
2	Jumlah dokumen monitoring & evaluasi pengelolaan SDA dan mineral disertai pelayanan	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
3	Jumlah dokumen pelayanan ijin pengelolaan & perusahaan sarang burung walet	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
4	Jumlah dok koordinasi penyusunan dan pengumpulan data produksi daerah (pertanian umum)	4 dokumen	100 %	4 dokumen	100 %
5	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan laporan data pengendalian inflasi	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
6	Jumlah peserta sosialisasi tentang pengendalian stabilisasi faktor pemicu/penahan inplasi daerah	40 org	100 %	40 org	100 %
7	Jumlah dokumen koordinasi dan pengumpulan data distribusi bahan pangan	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %

**Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada
Program Peningkatan Usaha Milik Daerah**

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah dokumen BUMD yang dibuat	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
2	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi BUMD/ BUMDes yg dibuat	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %

**Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada
Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonomi**

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah pameran dan peringatan hari jadi yang dilaksanakan	1 kali	100 %	1 kali	100 %
2	Jumlah peringatan hari besar yang dilaksanakan	6 kali	100 %	6 kali	100 %
3	Jumlah partisipasi untuk mengikuti pameran pembangunan / potensi daerah dan peringatan hari jadi	1 kali	100 %	1 kali	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

No.	Indikator	Target 2015		Target 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah pengadaan kartu tanda pengenal	3000 buah	100 %	1.250 buah	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara

No.	Indikator	Kinerja 2015		Kinerja 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah peserta pembinaan dan sistem persandian	120 org	50 %	150 org	100 %
2	Jumlah gelar Peralatan sandi di instansi pemerintah	66 buah	100 %	60 buah	100 %

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dan 2016 pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah

No.	Indikator	Kinerja 2015		Kinerja 2016	
		Realisasi kinerja	Capaian kinerja	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Jumlah penyusunan system Informasi Ketatausahaan Pimpinan berbasis IT	3 pekerjaan (9 SOP, 1 peninjauan korespondensi IT, 65 Adm surat menyurat)	100 %	3 pekerjaan (9 SOP, 1 peninjauan korespondensi IT, 65 Adm surat menyurat)	100 %

D. REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pagu indikatif Perangkat Daerah Sekretariat Daerah untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp.89.006.210.091,- dengan pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.18.191.033.628,- dan Belanja Langsungnya sebesar Rp.70.815.176.463,-. Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.15.461.163.055,- (84 %) dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.59.133.435.825,- (83,50 %). Realisasi anggaran untuk setiap Program dan Kegiatan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

**Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun 2016**

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	282.000.000	281.996.000	99,99
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet	1.133,979,996	1,133.966.221	99,99
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa asrama mahasiswa dan mes pemda	949,500,000	949,272,417	99,99
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, BBM, penyeberangan fery & pergantian suku cadang	85,750,000	85.726.400	99,97
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran jasa administrasi Keuangan dan pengelolaan keuangan	4.161.780.000	4.161.775.000	99,99
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor	228.000.000	228.000,000	100
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja lingkup setda	924.700,000	924.694.500	99,99
8	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	850.265.300	850.258.700	99,99
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	638.600.000	637.624.650	99,85
10	Penyediaan komponen instalasi	Jumlah penyediaan	715.039.000		

	listrik/penerangan bangunan kantor	komponen listrik/BBM dan sparepart ginset		715.023.650	99,99
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	907.871.400	907,804,150	99,99
12	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang undangan	Jumlah penyediaan media masa surat kabar	316.830.000	274.921.400	86,77
13	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan & minuman pegawai dan tamu	1.939,802.500	1,939.767.000	99,99
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yg diikuti	5,245.499.040	5.244.855.777	99,99
15	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/keamanan	Jumlah pembayaran tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dan keamanan	2.176.900.000	2.176.900.000	100
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yg diikuti	570.798.000	570.600.750	99,97
17	Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	Jumlah penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	2.871.105.000	2.801.172.700	97,56
	Rata-rata capaian realisasi anggaran		23.998.420.236	23.884.359.315	99,50

Dari rincian kegiatan diatas untuk capaian realisasi keuangan secara keseluruhan capaian Program **Pelayanan Administrasi Perkantoran** realisasi anggaran kegiatannya rata-rata mencapai 99,50 % ini termasuk kategori **Berhasil**

Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	Jumlah paket pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	182.500.000	173,581,000	95.11
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	280.925.800	264.753.000	94,24
3	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	311.000.000	74.896.000	24,08
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	462.360.000	439.258.000	95
5	Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan yang dipelihara	385.000.000	380.183.000	98.75
6	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala	963.000.000	955.172.000	99,19
7	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional	547.850.000	499.466.695	91,17
8	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan/instalasi air, listrik dan telepon rumah jabatan/ dinas	Jumlah pemeliharaan, jaringan listrik dan telepon rumah jabatan/dinas	155.000.000	151.433.000	97,70
9.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan/instalasi air, listrik dan telepon gedung kantor	Jumlah pemeliharaan, jaringan listrik dan telepon gedung kantor	215.000.000	201.053.000	93.51

10	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharaan ya rutin/berkala kend dinas/operasional	570,000,000	569,894,050	99,98
Rata-rata capaian realisasi anggaran			4.072.635.800	3.709.689.745	91,09

Dari rincian capaian realisasi keuangan pada kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas sebesar 24,08 % karena masih belum terpakai secara keseluruhan dan anggaran ini bersifat penyediaan. Secara keseluruhan capaian Program **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** realisasi anggaran kegiatannya rata-rata mencapai 91,01 % ini termasuk kategori **Berhasil**

Realisasi Anggaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai yg tersedia	292.974.000	292.974.000	100
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	181.895.000	181.778.000	99,94
3	Pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian olahraga	165.000.000	162.885.000	98,72
Rata-rata capaian realisasi anggaran			639.869,000	637.637.000	99,65

Dari rincian kegiatan diatas untuk capaian realisasi keuangan pada kegiatan Program **Peningkatan Disiplin Aparatur** realisasi anggaran kegiatannya rata-rata secara keseluruhan mencapai 99,65 % ini kategori **Berhasil**

Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	500.530.000	496.487.450	99,19
2	Bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yg mengikuti bintek	16.567.000	15.537.800	93,79
3	Pendidikan dan pelatihan bidang pemerintahan umum	Jumlah aparatur yg di bimtek	655.427.622	655.392.322	99,99
Rata-rata capaian realisasi anggaran			1.172.524.622	1.167.417.572	99,56

Untuk kegiatan Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran, sedangkan anggaran yg ada sudah terealisasi lebih dulu sebelum pemotongan. Dari rincian kegiatan diatas untuk capaian realisasi keuangan secara keseluruhan pada Program **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** rata-rata capaiannya sebesar 99,56 % ini termasuk kategori **Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan peningkatan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	149.999.900	144.149.900	96,10
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	59.528.800	59.528.800	100
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	42.600.000	42.600.000	100
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	45.927.000	45.927.000	100
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen monitoring dan pengendalian evaluasi pelaporan kinerja SKPD	172.822.800	166.822.800	96,53
6	Penyusunan instrumen/kelengkapan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen instrument/kelengkapan capaian kinerja dan keuangan SKPD	216.353.800	216.353.000	100
Rata-rata capaian realisasi anggaran			687.232.300	675.381.500	98,28

Dari rincian kegiatan diatas untuk capaian realisasi keuangan secara keseluruhan capaian **Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** rata-rata capainya 98,28 % ini termasuk kategori **Berhasil**

**Realisasi Anggaran Program Kerjasama Pembangunan
tahun 2016**

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah fasilitasi dengan dunia usaha/lembaga	152.368.000	125.418.800	82,31
Rata-rata capaian realisasi anggaran			152.368.000	125.418.800	82,31

Dari rincian kegiatan diatas untuk capaian realisasi keuangan secara keseluruhan capaian **Program Kerjasama Pembangunan** realisasi rata-rata capainya 82,31 % ini termasuk kategori **Berhasil**

**Realisasi Anggaran Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
tahun 2016**

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Pencadangan tanah untuk kegiatan pembangunan	Jumlah paket lahan tanah yang dibebaskan	8.055.820.000	611.075.900	7,59
2	Inventarisasi dan sertifikasi tanah pemerintah daerah	Jumlah pendataan tanah aset pemda dan pengajuan sertifikasi tanah	656.985.000	234.674.600	35,72
3	Fasilitasi pelayanan Ijin lokasi	Jumlah perijinan lokasi yang diterbitkan	32.700,000	7.954.000	24,33
4	Pelayanan pencadangan tanah untuk kegiatan pembangunan	Jumlah fasilitasi pelayanan pengadaan tanah	124.725.000	22.633.700	18,15
Rata-rata capaian realisasi anggaran			8.870.230.000	878.338.800	9,88

Dari rincian kegiatan Pencadangan tanah realisasi 7,59 % disebabkan adanya lahan tanah yang dibebaskan masih dalam perkara (adanya pengakuan dari pihak masyarakat) sehingga anggaran tidak bisa direalisasikan dan anggaran bersifat penyediaan, kegiatan Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah sebesar 35,72 % disebabkan belum selesainya pensertifikatan tanah yang diusulkan ke BPN sehingga untuk capaian target dan anggaran tidak dapat terealisasi, untuk kegiatan Fasilitasi Pelayanan Ijin Lokasi sebesar 24,33 % adanya anggaran untuk memfasilitasi lahan perusahaan yang diberikan ijin lokasi masih belum terpakai secara keseluruhan dan juga bersifat penyediaan. Secara keseluruhan

capaian Program **Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** realisasi rata-rata capaiannya 9,88 % termasuk kategori **Kurang Berhasil**

Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pelayanan kedinasan KDH/WKDH tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah penyelenggaraa n dialog	324,460,000	308,925,000	95,21
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah penerimaan kunjungan	949,750,000	917,886,270	96,65
3	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Jumlah rapat koordinasi unsur muspida	455,500,000	380,955,500	83,64
4	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	jumlah rapat koordinasi pejabat lingkungan pemda kotabaru	202,000,000	157,684,720	78,06
5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah perjalanan dinas / kunjungan kerja dalam daerah	120,000,000	119.800,000	99,83
6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH	1,096,900,000	1,023,100,835	93,27
7	Pelayanan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah kebutuhan harian rumah tangga kepala daerah dan wakil	956,025,874	1,829,437,612	93,53
8	Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan dan peralatan kesehatan bupati & wakil bupati	Jumlah peralatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan kepala daerah dan wakil	91,200.000	33,715,000	36,97
9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon dan air	339,000,000	281,463,468	83,03
10	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	20,846,008	20,771,525	99,64

11	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	34,680,900	34214,550	98,06
12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	30,000,000	29,435,000	98,12
13	Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas KDH dan WKDH beserta kelengkapannya	155,300,000	154,616,000	99,56
14	Penyediaan rumusan informasi kegiatan KDH dan WKDH	Jumlah buletin kegiatan bupati/wkl bupati	118,185,000	75,772,300	64,11
	Rata-rata capaian realisasi anggaran		5.893.847.782	5.367.781.780	91,07

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan dan peralatan kesehatan bupati & wakil bupati dengan realisasi sebesar 36,97 % karena sifatnya anggaran penyediaan. Dari capaian **Program Peningkatan Pelayanan kedinasan KDH/WKDH** secara keseluruhan, dengan realisasi rata-rata capaiannya 91,07 % termasuk kategori **Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah fasilitasi kasus konflik pertanahan	438,400,000	204.556.500	46,66
	Rata-rata capaian realisasi anggaran		438,400,000	242,272,600	46,66

Dari capaian **Program Penyelesaian komplik-komplik Pertanahan** untuk kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan masih belum terealisasi karena anggaran bersifat penyediaan, dengan realisasi capaiannya 46,66 % termasuk kategori **Kurang Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Desimenasi dan pendistribusian media baru (website)	Jumlah website yg diidistribusikan	479.596.750	453.640.550	94,59
	Rata-rata capaian realisasi anggaran		479.596.750	453.640.550	94,59

Dari rincian kegiatan diatas capaian **Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik**, dengan realisasi capaiannya 94,59 % ini termasuk kategori **Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah pejabat negara yg mengisi LHKPN	135,000,000	115,458,189	85,52
2	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Jumlah dokumen LAKIP Kabupaten Kotabaru Tahun 2016	475,050,000	465,125,255	97,91
3	Evaluasi pelaksanaan kinerja dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah dokumen pelaporan aksi PPK	13,883,000	13,883,000	100
4	Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen yg disusun	90,000,000	73,562,500	81,74
Rata-rata capaian realisasi anggaran			713.933.000	668.028.944	93,57

Dari rincian kegiatan diatas capaian **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** realisasi capaian secara keseluruhan sebesar 93,57 % termasuk kategori **Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Penyusunan pelayanan dan pengelolaan informasi kepala daerah dan sekretariat daerah	Jumlah 100 bh kliping, naskah sambutan KDH/WKDH	58,857,000	56,793,100	96,49
Rata-rata capaian realisasi anggaran			58.857.000	56.793.100	96,49

Dari rincian kegiatan diatas capaian **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi** dengan realisasi capaiannya 96,49 % termasuk kategori **Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program **Peningkatan Kerjasama antar** Pemerintah Daerah tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Monitoring pengawasan dan pembinaan tindak lanjut kerjasama antar daerah	Jumlah pelaksanaan, pengawasan pembinaan monitoring antar daerah	7,645,000	7,945,000	100
2	Fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah	958,799,813	342,899,381	96.92

3	Kajian kelembagaan pranata kerjasama pembangunan daerah	Jumlah paket kajian kelembagaan	242,674,500	239.905.501	98.86
Rata – rata capaian realisasi anggaran			604.119.313	590.449.832	97,74

Dari rincian kegiatan diatas capaian **Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan** realisasi capaian secara keseluruhan sebesar 97,74 % termasuk kategori **Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Penataan Peraturan Perundang-undangan tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah perkara yang ditangani mempunyai kekuatan hkm tetap	1,025.494.100	1.023.791.400	99,83
2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah raperda/raperb up yang ditetapkan menjadi perda/perbup	1,308.023.500	1,301.622.400	99,51
3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah kualitas raperda yang ditetapkan menjadi perda	497.934.200	497.293.050	99,87
4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen fasilitasi peraturan perundang-undangan	84.000.000	82.422.500	98,12
5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah publikasi warta peraturan perundang-undangan	217.000.000	211.395.000	97,42
6	Kajian peraturan perundangan-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar perundang-undangan	284.887.500	283.423.200	99,49

		daerah			
7	Rencana aksi nasional hak azasi manusia	Jumlah peserta peningkatan pemahaman, pemenuhan dan penghormatan HAM	75.689.600	74.127.800	97,94
	Rata-rata capaian realisasi anggaran		3.493.028.900	3.474.075.350	99,46

Dari rincian kegiatan diatas capaian **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** dengan realisasi capaian secara keseluruhan sebesar 99,46 % termasuk kategori **Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Penataan Daerah Otonomi Baru tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	Jumlah SOTK perangkat daerah yang dievaluasi	255.250.923	255.110.961	99.95
2	Pembinaan ketatalaksanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen pembinaan	75.950.000	62.497.828	82.29
3	Pembinaan berkelanjutan organisasi pemerintah kecamatan dan kelurahan	Jumlah pengadaan buku administrasi kecamatan dan kelurahan	102.864.000	102.585.300	99.73
4	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	Jumlah dokumen laporan LPPD	407.795.000	407.314.300	99.88
5	Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah otonom	Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi	51.870.000	29.678.600	57.22
6	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas kabupaten, kecamatan dan desa	Jumlah kecamatan dan desa yang difasilitasi	1,008.162,000	875.912.400	86.88
7	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah fasilitasi pemerintahan umum yang diselenggarakan	91,000.000	75.000.468	82.42
8	Fasilitasi pemekaran kecamatan	Pelaksanaan penyusunan laporan administrasi kecamatan dan kelurahan	132.260.450	132.245.950	99.99
9	Fasilitasi otonomi daerah	Jumlah fasilitasi otda	155.552.000	143.236.006	92.08
10	Pelaksanaan tugas pembantuan	Jumlah fasilitasi pemerintahan umum yg dilaksanakan	77.064.000	69.375.840	90.02

	Rata-rata capaian realisasi anggaran	2.357.768.373	2.152.957.653	91,31
--	--------------------------------------	---------------	---------------	-------

Dari rincian kegiatan diatas capaian **Program Penataan Daerah Otonomi Baru** dengan realisasi capaian secara keseluruhan sebesar 91,31 % termasuk kategori **Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah tahun 2016

Program / Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian Anggaran (%)
1	Penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)	Jumlah dok. Penataan kelembagaan	112.650.000	111.074.061	98.60
2	Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) SKPD	Jumlah sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan penerapan SPM 15 kementerian	125.000,000	112,195.035	89.76
3.	Penerapan ISO - 9001 pada SKPD	Jumlah SOTK yang di ISO	286.000.000	234.204.929	81.89
4.	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD	Jumlah penyusunan IKM SKPD	145.000,000	83.327.587	57.47
5.	Penyusunan analisis beban kerja	Jumlah Perangkat Daerah yg dilakukan ABK	95.000,000	73.337.865	77.20
6.	Penyusunan formasi jabatan fungsional	Jumlah dokumen perbup. Jabatan fungsional	65.000,000	31.324.505	48.19
7.	Fasilitasi pelaksanaan unit layanan pengadaan barang/jasa	Jumlah pelaksanaan ULP barang/jasa	1.065.615.500	798.355.380	74,92
8.	Fasilitasi penyusunan SOP SKPD	Dokumen SOP SKPD	82.800.000	62.689.570	75.71
9.	Penyusunan analisis jabatan	Jumlah dokumen anjab yg disusun	250.844.250	200.204.759	79.81
10	Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah pelaksanaan reformasi birokrasi	9.155.077	9.155.077	100

	Rata-rata capaian realisasi anggaran	2.237.064.827	1.715.866.768	76,70

Dari rincian kegiatan diatas capaian **Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah** kegiatan Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional sebesar 48,19 % karena adanya pemotongan anggaran, untuk realisasi capaian secara keseluruhan sebesar 76,70 % termasuk kategori **Cukup Berhasil**.

**Realisasi Anggaran Program Fasilitas Peningkatan dan Penanganan Sosial,
Budaya dan Agama
tahun 2016**

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Koordinasi, fasilitasi penyerahan bantuan kepada daerah di kecamatan	Jumlah koordinasi kecamatan untuk penyerahan bantuan kepada organisasi keagamaan, tempat ibadah dan ponpes	73.000.000	50.844.000	69.65
2	Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan masyarakat	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan masyarakat	8.745.929.100	7.819.568.957	89.41
3	Koordinasi dan sinkronisasi, validasi database bantuan keagamaan kepala daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi database keagamaan kepada daerah	209.125.000	90.478.200	43.27
4	Koordinasi fasilitasi pembinaan pendidikan pemuda olahraga dan kebudayaan	Jumlah koordinasi pembinaan pendidikan, pemuda olahraga dan kebudayaan	55.560.000	35.505.000	70.22
5	Pelaksanaan kesehatan, kesejahteraan sosial dan raskin	Jumlah koordinasi fasilitasi pelaksanaan kesehatan, kesos dan raskin	52.788.000	45.363.700	85.94
Rata-rata capaian realisasi anggaran			9.131.402.100	8.041.759.857	88,07

Untuk kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi, validasi database bantuan keagamaan kepala daerah 43,27 % karena kegiatan ini bersifat penyediaan. Dari rincian realisasi capaian **Program Fasilitas Peningkatan dan Penanganan Sosial, Budaya, Agama**, secara keseluruhan sebesar 88,07 % termasuk kategori **Berhasil**.

**Realisasi Anggaran Program Fasilitas Pembinaan dan Peningkatan
Bidang Ekonomi tahun 2016**

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Koordinasi pengelolaan sumber daya alam	Jumlah dokumen pengelola sumber daya alam	77,930,000	74.443.700	95,53
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen konfilasi dan produksi daerah tetang pengelolaan SDA	27,850,000	10.440.000	37.49
3	Koordinator pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet	Pelayanan ijin rekomendasi perusahaan sarang burung walet	41.682.500	10.287.500	24.68
4	Koordinasi penyusunan dan pengumpulan data produksi daerah (pertanian umum)	Data produksi pertanian umum	16.550.500	10.550.500	63.74
5	Koordinasi dan penyusunan laporan data pengendalian inflasi	Data pemicu pengendalian inflasi	56.857.000	45.273.000	79.63
6	Sosialisasi tentang pengendalian stabilisasi faktor pemicu/penahanan inflasi daerah	Jumlah peserta sosialisasi	20.400.700	5.950.700	29.17
7	Koordinasi dan pengumpulan data distribusi bahan pangan	Pemantauan grafik data distribusi bahan pangan	52.990.000	35.456.500	66.91
Rata-rata capaian realisasi anggaran			294.260.700	192.401.900	65,38

Untuk kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian realisasi 37,49 % karena pemantauan keadaan mineral, migas dan PLN sangat sulit dijangkau, kegiatan Koordinator pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet realisasinya 24,68 karena tidak bisa mengumpulkan data pemilik bangunan sarang burung walet sedang untuk Sosialisasi tentang pengendalian stabilisasi faktor pemicu/penahanan inflasi daerah realisasinya 29,17 % karena adanya pemotongan anggaran. Dari rincian kegiatan capaian **Program Fasilitas Pembinaan dan Peningkatan Bidang Ekonomi**, capaian secara keseluruhan sebesar 65,38 % termasuk kategori **Cukup Berhasil**.

**Realisasi Anggaran Program Peningkatan Usaha Milik Daerah
tahun 2016**

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Fasilitasi pendirian, peningkatan, dan pengembangan badan	Jumlah BUMD yang difasilitasi	167.180.000	150.230.600	89.86

	usaha milik daerah (BUMD)				
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	33.500.000	11.265.000	33,63
	Rata-rata capaian realisasi anggaran		200.680.000	161.495.600	80,47

Untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebesar 33,63 % karena adanya pemotongan anggaran. Dari rincian kegiatan capaian **Program Peningkatan Usaha Milik Daerah**, capaian secara keseluruhan sebesar 80,47 % termasuk kategori **Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonom tahun 2016

	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Pameran dan peringatan hari jadi	Jumlah peringatan hari jadi yg dilaksanakan	1,600.559.800	1.504.192.459	93,98
2	Peringatan hari-hari besar	Jumlah peringatan hari besar yg dilaksanakan	1,502.226.650	1.379.310.350	91,82
3	Partisipasi dalam pameran pembangunan/potensi daerah dan peringatan hari jadi	Jumlah pameran dan peringatan hari jadi	49,732,210	49,550,000	99,63
	Rata-rata capaian realisasi anggaran		3.152.518.560	2.933052.809	93,04

Dari rincian kegiatan diatas capaian **Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonom**, realisasi capaian secara keseluruhan sebesar 93,04 % termasuk kategori **Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur tahun 2016

	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1.	Pengadaan kartu tanda pengenal	Jumlah kartu pengenal	88.200.000	58.300.500	66,10
	Rata-rata capaian realisasi anggaran		88.200.000	58.300.500	66,10

Dari rincian kegiatan diatas capaian **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**, realisasi capaiannya sebesar 66,10 % termasuk kategori **Cukup Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Pembinaan dan fasilitasi sistem persandian	Jumlah pembinaan sistem persandian daerah	1.366.175.500	1.328.303.850	97,23
2	Pembinaan gelar peralatan sandi di Instansi pemerintah	Jumlah pembinaan penggunaan dan peralatan sandi daerah	231.200.000	190.545.600	82,42
Rata-rata capaian realisasi anggaran			1,597.375.500	1.518.849.450	95.08

Dari rincian kegiatan diatas capaian **Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara**, realisasi capaian secara keseluruhan sebesar 95.08% termasuk kategori **Berhasil**.

Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah tahun 2016

Program/Kegiatan		Indikator kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)
1	Pengembangan sisitem ketatausahaan pimpinan daerah	Jumlah paket pekerjaan sisten TU	480.843.700	467.182.500	97,16
Rata-rata capaian realisasi anggaran			480.843.700	467.182.500	97.16

Dari rincian kegiatan diatas capaian **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan**, realisasi capaian secara keseluruhan sebesar 97,16 % termasuk kategori **Berhasil**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotabaru dan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu tahunan. Penyusunan LAKIP (Laporan kinerja) ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategik melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan pelayanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 ini masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup berat. Meskipun demikian, tekad bersama dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru sangat memacu semangat untuk terus berkarya bagi kemajuan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru pada khususnya dan Kabupaten Kotabaru pada umumnya dalam rangka “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisata Serta Kemandirian Menuju Masyarakat yang Berkualitas dan Sejahtera”.

Kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian yang telah dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru masih terdapat banyak hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Kita semua berharap LAKIP (Laporan kinerja) ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik lagi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. SURIANSYAH. M.M
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SAYED JAFAR, SH
Jabatan : Bupati Kotabaru
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotabaru, 13 Februari 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.SAYED JAFAR, SH

Drs. H. SURIANSYAH,MM
NIP.19590319 198603 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor dan kinerja administrasi pemerintah	Tingkat pelayanan administrasi terhadap aparatur dan masyarakat	12 bulan
2.	Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru	Jumlah layanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	400 pengadaan
3.	Meningkatnya tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tingkat layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	19 Kali
4.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan	Persentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penataan Daerah Otonom	100 %
5.	Meningkatnya penyebarluasan hasil-hasil pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan pameran dan Peringatan hari jadi	2 kali
6.	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hokum raperda/raperbup menjadi perda/perbup	20 perda/perbup
7.	Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Tingkat Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)	56 PD
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja (LAKIP, LPPD dan LKPJ)	Bulan Februari
9.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Jumlah pelaksanaan bimtek	60 kali
10	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Jumlah penyelesaian konflik pertanahan	11 kasus
11	Meningkatnya kualitas sosial, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Sosial, Budaya dan Agama.	60 kegiatan
		Jumlah laporan monev pelayanan sumber daya alam dan produk unggulan daerah.	2 dokumen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.998.420.236	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.072.635.000	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	639.869.000	
4	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	1.172.524.622	

No	Program	Anggaran	Keterangan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	687.732.300	
6	Program Kerjasama Pembangunan	152.368.000	
7	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	8.870.230.000	
8	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	5.893.847.782	
9	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	438.400.000	
10	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	479.596.750	
11	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	713.933.000	
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	58.857.000	
13	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	604.119.313	
14	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.493.028.900	
15	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	2.357.768.373	
16	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	2.237.064.827	
17	Program Fasilitasi Peningkatan Sosial, Budaya dan Agama	9.131.402.100	
18	Program Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Bidang Ekonomi	294.260.700	
19	Program Peningkatan Usaha Milik Daerah/Desa (BUMD/BUMDesa)	200.680.000	
20	Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonom	3.152.518.560	
21	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	88.200.000	
22	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara	1.597.375.500	
23	Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	480.843.700	
	Jumlah	70.815.176.463	

Kotabaru, 13 Februari 2016

Bupati Kotabaru,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru

H. SAYED JAFAR, SH

Drs. H. SURIANSYAH, MM
NIP. 19590319 198603 1 010

**PENETAPAN KINERJA
SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan kantor dan kinerja administrasi pemerintah	Tingkat kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	18.335.685.865
	Jumlah surat masuk dan keluar	60.000 lembar surat masuk dan keluar	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	281.996.000
	Jumlah pembayaran jasa listrik, air, telepon yg harus dibayar dalam 1 tahun	600 jumlah kali jasa rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	1.133.966.221
	Jumlah penyediaan jasa asrama mahasiswa dan mess pemda	950 orang	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	949.272.417
	Jumlah pemeliharaan kend. dinas/ operasional, BBM, penyeb.ferry & pergantian suku cadang	70 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	85.726.400
	Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan	2022 orang kali bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4.161.775.000
	Jumlah pembayaran jasa kebersihan gedung kantor	380 kali jasa	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	228.000.000
	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja lingkup Setda	1321 kali	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	924.694.500
	Jumlah penyediaan alat tulis	396 jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	850.258.700
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72 set dari 70.000 lembar penggandaan	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	637.624.650
Jumlah penyediaan komponen listrik/BBM dan sparepart genset	108 set	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	715.023.650	

	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	324 set	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	907.804.150
	Jumlah penyediaan media massa/ surat kabar	15 jenis	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	274.921.400
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	110.160 orang	Penyediaan Makanan & Minuman	1.939.767.000
	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	525 orang kali	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	5.244.855.777
	Jumlah pembayaran tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran dan keamanan	2.798 orang kali bulan	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran/ Keamanan	2.176.900.000
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	208 orang kali	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam daerah	570.600.750
	Jumlah penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	12 bulan	Penyediaan Jasa Pengumuman & Propaganda	2.801.172.700
Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten kotabaru	<i>Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor</i>	216 buah/21 unit	<i>Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur</i>	3.709.689.745
	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan / Dinas	25 buah/unit	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	173.581.000
	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	137 buah/unit	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	264.753.000
	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	4 unit	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	74.896.000
	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	50 unit/buah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	439.258.000
	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	3 unit	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	380.183.000
	Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala	6 unit	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	955.172.000
	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional	130 kali untuk 13 mobil jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	499.466.695

	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	25 unit	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	569.894.050
	Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan/ instalasi air, listrik dan telepon rumah jabatan/dinas	4 pekerjaan pemeliharaan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan/ Instalasi Air, Listrik dan Telepon Rumah Jabatan/Dinas	151.433.000
	Jumlah pemeliharaan jaringan air, listrik & telepon gedung kantor	3 unit	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan/ Instalasi Air, Listrik dan Telepon Gedung kantor	201.053.000
	<i>Terpenuhinya disiplin terhadap aparatur</i>	304 stel dan 385 baju	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	<u>637.637.000</u>
	Jumlah pakaian dinas pegawai yang tersedia	304 stel	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	292.974.000
	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	385 baju	Pengadaan pakaian khusus Hari-hari Tertentu	181.778.000
	Jumlah pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya	235 pakaian olahraga	Pengadaan pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	162.885.000
	<i>Tingkat pelayanan Informasi publik</i>	19 website	<i>Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik</i>	<u>453.640.550</u>
	Jumlah pelaksanaan deseminasi dan pendistribusian media baru (website)	19 website	Deseminasi dan Pendistribusian Media Baru (website)	453.640.550
	<i>Tingkat pengembangan pengamanan rahasia negara</i>	216 kali	<i>Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara</i>	<u>1.518.849.450</u>
	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sistem persandian	150 kali	Pembinaan dan Fasilitasi Sistem Persandian	1.328.303.850
	Jumlah pelaksanaan pembinaan gelar peralatan sandi di instansi pemerintah	66 kali	Pembinaan Gelar Peralatan Sandi di Instansi Pemerintah	190.545.600
	<i>Terciptanya layanan Informasi KDH/WKDH</i>	120 kliping naskah sambutan Bupati/wakil Bupati	<i>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</i>	<u>56.793.100</u>
	Jumlah kliping naskah sambutan KDH/WKDH yang tersedia	120 kliping naskah sambutan Bupati/wakil Bupati	Penyusunan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	56.793.100

	<i>Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	35 dokumen	<i>Program Peningk. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keu.</i>	<u>675.381.500</u>
	Jumlah dokumen laporan peningkatan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	144.149.900
	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	59.528.800
	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	2 dokumen	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	42.600.000
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen (Laporan Keuangan Akhir Tahun)	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.927.000
	Jumlah dokumen monitoring dan pengendalian evaluasi pelaporan kinerja SKPD	180 buku (2 dokumen)	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Kinerja SKPD	166.822.800
	Jumlah dokumen penyusunan instrumen/kelengkapan capaian kinerja dan keuangan SKPD	24 dokumen	Penyusunan Instrumen/Kelengkapan Capaian Kinerja dan keuangan SKPD	216.353.000
Meningkatnya tugas kedinasan KDH/WKDH	<i>Terlaksananya pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH</i>	354 kali	<i>Program Peningkatan pelayanan kedinasan KDH / WKDH</i>	<i>5.367.781.780</i>
	Jumlah kegiatan dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan	22 kali rapat	Dialog/audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial & masyarakat	308.925.000
	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara	35 kali penerimaan kunjungan	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	917.886.270
	Jumlah rapat koordinasi unsur muspida	15 kali	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	380.959.500
	Jumlah rapat koordinasi di lingkungan Pemda	36 kali	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	157.684.720

	Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi KDH / Wakil KDH	37 kali	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	119.800.000
	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda	72 kali	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1.023.100.835
	Jumlah pelayanan rumah tangga KDH / Wakil KDH	24 kali	Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.829.437.612
	Jumlah penyediaan peralatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	33 (25 set peralatan olahraga & 8 kali pemeliharaan kesehatan)	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan & Peralatan Kesehatan Bupati & Wakil Bupati	33.715.000
	Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon dan air	84 kali (12 x 7 rekening)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	281.463.468
	Jumlah penyediaan tenaga kebersihan kantor	12 kali utk 6 orang (penyediaan alat kebersihan)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.771.525
	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	39 jenis ATK selama 12 bulan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.214.550
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 kali (6 macam barang cetakan)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.435.000
	Jumlah pakaian dinas KDH/ Wakil KDH	116 stel	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	154.616.000
	Jumlah jurnal/buletin kegiatan Bupati / Wakil Bupati	12 bulan (1 buletin x 100 exemplar)	Penyediaan Rumusan Informasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75.772.300
	<i>Tingkat pelayanan kedinasan pimpinan daerah</i>	3 kegiatan	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah</i>	<u>467.182.500</u>
	Jumlah pengembangan sistem ketatausahaan pimpinan daerah	3 kegiatan	Pengembangan Sistem Ketatausahaan Pimpinan Daerah	467.182.500
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan	<i>Tingkat pemenuhan pembentukan organisasi sesuai ketentuan dan kebutuhan daerah, penyampaian laporan pemda serta terlaksananya kepastian hukum dalam permasalahan batas wilayah administrasi pemerintah</i>	100%	<i>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</i>	2.152.957.653

Jumlah SOTK perangkat daerah yang dievaluasi	32 Rancangan Perkada	Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru	255.110.961
Jumlah dokumen pembinaan	2 dokumen	Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	62.497.828
Jumlah pengadaan buku administrasi kecamatan dan kelurahan	21 kecamatan	Pembinaan Berkelanjutan Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	102.585.300
Jumlah laporan penyelenggaraan pemda	80 buku	Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	407.314.300
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	25 kecamatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Otonom	29.678.600
Jumlah kabupaten, kecamatan dan desa yang difasilitasi	22 kegiatan (2 gerbang batas kecamatan, 10 gerbang batas desa, 5 usulan nama pembakuan rupa bumi, 5 fasilitas batas kabupaten,kecamatan & desa)	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa	875.912.400
Jumlah fasilitasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	10 kali	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	75.000.468
Jumlah fasilitasi pemekaran kecamatan	2 kecamatan	Fasilitasi Pemekaran Kecamatan	132.245.950
Jumlah fasilitasi otonomi daerah	10 kali	Fasilitasi Otonomi Daerah	143.236.006
Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan	1 kali	Pelaksanaan Tugas Pembantuan	69.375.840
<i>Terlaksananya payung hukum bagi pemerintah daerah dalam bekerjasama dengan pihak lain</i>	31 kali	<i>Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah</i>	<i>590.449.832</i>
Jumlah pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pembinaan tindak lanjut kerjasama antar daerah perbatasan	4 kali	Monitoring, Pengawasan dan Pembinaan Tindak Lanjut Kerjasama antar Daerah	7.645.000

	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah	27 kali	Fasilitasi Kerjasama Daerah	342.899.331
	Jumlah paket kajian kelembagaan pranata kerjasama pembangunan daerah	2 paket	Kajian Kelembagaan Pranata Kerjasama Pembangunan Daerah	239.905.501
Meningkatnya Penyebarluasan Hasil – hasil Pembangunan Daerah	<i>Peningkatan promosi dan penyebarluasan hasil pembangunan daerah</i>	8 kali	<i>Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonom</i>	<u>2.933.052.809</u>
	Jumlah pameran dan peringatan hari jadi	1 kali	Pameran dan Peringatan Hari Jadi	1.504.192.459
	Jumlah peringatan hari besar yang dilaksanakan	6 kali	Peringatan Hari-hari Besar	1.379.310.350
	Jumlah partisipasi untuk mengikuti pameran pembangunan/potensi daerah dan peringatan hari jadi	1 kali	Partisipasi dalam pameran Pembangunan / Potensi Daerah dan Peringatan Hari Jadi	49.550.000
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<i>Tingkat ketaatan masyarakat dan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan</i>	20 perda/perbup	<i>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</i>	3.474.075.350
	Jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap	7 perkara perdata & TUN	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	1.023.791.400
	Jumlah raperda yang akan ditetapkan menjadi perda	20 perda/perbup	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	1.301.622.400
	Jumlah kualitas raperda yang ditetapkan menjadi perda	20 perda	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	497.293.050
	Jumlah fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 dokumen himpunan lembaran negara	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	82.422.500
	Jumlah publikasi warta perundang-undangan	194 buah	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	211.395.000
	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	20 perda	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Per-Undang-undangan yag baru, lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	283.423.200

	Jumlah peserta kegiatan rencana aksi nasional hak asasi manusia	120 orang	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	74.127.800
Meningkatkan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat Ukuran	<i>Tingkat penataan struktur organisasi yang efektif dan efisien</i>	9 dokumen, 56 SKPD	<i>Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah</i>	<i>1.715.866.768</i>
	Jumlah dokumen pelaksanaan penataan kelembagaan	1 dokumen	Penataan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)	111.074.061
	Jumlah dokumen SOP SKPD yang disusun	1 dokumen	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD	112.195.035
	Jumlah dokumen SOTK perangkat daerah yang di ISO	1 dokumen	Penerapan ISO - 9001 pada SKPD	234.204.929
	Jumlah dokumen penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD	1 dokumen	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD	83.327.587
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan analisis beban kerja	56 SKPD	Penyusunan Analisis Beban Kerja	73.337.865
	Jumlah dokumen jabatan fungsional yang disusun	2 dokumen	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional	31.324.505
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan unit layanan pengadaan barang/jasa	1 kegiatan	Fasilitasi Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	798.355.380
	Jumlah dokumen SOP SKPD yang disusun	2 kegiatan (1 dokumen, 1 paket notebook & aplikasi program)	Fasilitasi Penyusunan SOP SKPD	62.687.570
	Jumlah dokumen anjab yang disusun	56 SKPD dan Kecamatan	Penyusunan Analisis Jabatan	200.204.759
Jumlah pelaksanaan penataan reformasi birokrasi	1 dokumen	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	9.155.077	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	<i>Penyelenggaraan pemerintah daerah bebas KKN</i>	105 dokumen	<i>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</i>	<i>668.028.944</i>
	Jumlah pejabat penyelenggara negara yang mengisi LHKPN	1 berkas (100 dokumen LHKPN)	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	115.458.189

	Jumlah dokumen LAKIP tingkat Kabupaten	1 dokumen LAKIP Tahun 2016	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	465.125.125
	Jumlah dokumen pelaporan aksi PPK	4 dokumen Laporan RAN dan RAD	Evaluasi Pelaksanaan Kinerja & Lap. Keuangan Pemda	13.883.000
	Jumlah dokumen penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	1 dokumen	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	73.562.500
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	<i>Peningkatan wawasan sumber daya aparatur</i>	710 orang	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</i>	<u>1.167.417.572</u>
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	600 orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	496.487.450
	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	50 orang	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	15.537.800
	Jumlah Diklat Bidang Pemerintahan Umum	60 orang	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan Umum	655.392.322
	<i>Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</i>	1250 buah	<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</i>	<u>58.300.500</u>
	Jumlah Pengadaan Kartu Tanda Pengenal	1250 buah	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal	58.300.500
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<i>Tingkat layanan kegiatan Sertifikasi lahan sesuai dengan Tata Ruang</i>	67 kegiatan, 2 paket	<i>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</i>	876.338.800
	Jumlah paket pencadangan tanah	2 paket pengadaan	Pencadangan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan	611.075.900
	Jumlah tanah pemda yang di inventarisasi dan di sertifikasi	55 (30 desa kegiatan inventarisasi, dan 25 sertifikasi tanah pemda)	Inventarisasi & Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah	234.674.600
	jumlah lahan perusahaan	7 layanan fasilitas	Fasilitasi Pelayanan Ijin Lokasi	22.633.700
	<i>Penyelesaian mediasi konflik-konflik pertanahan</i>	12 kasus	<i>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</i>	<u>204.556.500</u>

	Jumlah Fasilitasi kasus penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Kotabaru	12 kasus	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	204.556.500
Meningkatnya Kualitas Sosial, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	<i>Peningk. kelancaran pendistribusian raskin ke kecamatan pemberian bantuan ke obyek sasaran & kelancaran koordinasi dgn instansi lain terkait dlm rangka fasilitasi penanggulangan pasca bencana</i>	80 koordinasi, 60 kegiatan	<i>Program Fasilitasi Peningkatan dan Penanganan Sosial, Budaya, dan Agama</i>	8.041.759.857
	Jumlah koordinasi/ fasilitasi kecamatan untuk penyerahan bantuan kepada organisasi keagamaan, tempat ibadah, ponpes dll.	20 koordinasi	Koordinasi, Fasilitasi Penyerahan bantuan kepada Daerah di Kecamatan	50.844.000
	Jumlah penyediaan/ penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan masyarakat	60 keg (19 organisasi)	Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	7.819.568.957
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi, validasi database bantuan keagamaan kepala daerah	20 kali koordinasi	Koordinasi dan Sinkronisasi, Validasi database bantuan Keagamaan Kepala Daerah	90.478.200
	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi Pembinaan Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan	20 koordinasi	Koordinasi, Fasilitasi Pembinaan Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan	35.505.000
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kesehatan, kesejahteraan sosial dan raskin	20 koordinasi / fasilitasi	Pelaksanaan Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Raskin	45.363.700
	<i>Penyediaan dokumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi bidang ekonomi</i>	10 dokumen	<i>Program Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Bidang Ekonomi</i>	<u>192.401.900</u>
	Jumlah dokumen pengelolaan SDA	1 dokumen	Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam	74.443.700
	Jumlah dokumen monitoring & evaluasi pengelolaan SDA dan mineral disertai pelayanan	1 dokumen	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10.440.000
	Jumlah dokumen koordinasi pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet	1 dokumen (10 x rapat)	Koordinasi pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet	10.287.500

	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dan pengumpulan data produksi daerah (pertanian umum)	4 dokumen	Koordinasi penyusunan dan pengumpulan data produksi daerah (pertanian umum)	10.550.500
	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan data pengendalian inflasi	1 dokumen	Koordinasi dan penyusunan laporan data pengendalian inflasi	45.273.000
	Jumlah dokumen sosialisasi tentang pengendalian stabilisasi faktor pemicu/penahan inflasi daerah	1 dokumen (40 orang)	Sosialisasi tentang pengendalian stabilisasi faktor pemicu/penahan inflasi daerah	5.950.700
	Jumlah dokumen koordinasi dan pengumpulan data distribusi bahan pangan	1 dokumen	Koordinasi dan pengumpulan data distribusi bahan pangan	35.456.500
	<i>Peningkatan Kerjasama Pembangunan</i>	1 dokumen	<i>Program Kerjasama Pembangunan</i>	<u>125.418.800</u>
	Jumlah dokumen fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	1 dokumen	Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	125.418.800
	<i>Peningkatan pendapatan daerah</i>	2 dokumen	<i>Program Peningkatan Usaha Milik Daerah/Desa (BUMD/BUMDes)</i>	<u>161.495.600</u>
	Jumlah dokumen fasilitasi pendirian, peningkatan dan pengembangan BUMD	1 dokumen	Fasilitasi Pendirian, Peningkatan & Pengembangan BUMD	150.230.600
	Jumlah dokumen monitoring & evaluasi BUMD/ BUMDes yg dibuat	1 dokumen	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11.265.000

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

